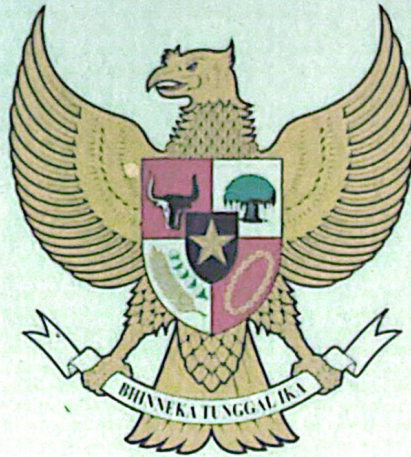




**PEMERINTAH DESA SIDABOWA
KECAMATAN PATIKRAJA
KABUPATEN BANYUMAS**

**PERATURAN DESA SIDABOWA
NOMOR 01 TAHUN 2024**

**DESA : SIDABOWA
KECAMATAN: PATIKRAJA
KABUPATEN : BANYUMAS**

**REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA (APBDes)
TAHUN ANGGARAN 2023**



**KEPALA DESA SIDABOWA KECAMATAN PATIKRAJA
KABUPATEN BANYUMAS**

**PERATURAN DESA SIDABOWA KECAMATAN PATIKRAJA
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 01 TAHUN 2024**

**TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDABOWA
KECAMATAN PATIKRAJA KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SIDABOWA KECAMATAN PATIKRAJA KABUPATEN BANYUMAS**

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Sidabowa Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidabowa Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa;
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
23. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
24. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, sebagaimana diubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Desa;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Kerja Sama Desa;
28. Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Asst Desa;
29. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 36);
30. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 57);

31. Peraturan Bupati Banyumas No 02 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Banyumas No 73 Tahun 2014 Tentang Pengalokasian dan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa;
32. Peraturan Bupati Banyumas No 28 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa;
33. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 29 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Desa;
34. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
35. Peraturan Bupati Banyumas No. 22 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banyumas No 05 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan, dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas;
36. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 66 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Desa di Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024;
37. Peraturan Desa Sidabowa Nomor 04 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 - 2027 (Lembaran Desa Sidabowa Tahun 2022 Nomor 04);
38. Peraturan Desa Sidabowa Nomor 05 Tahun 2022 tentang Penyerahan Modal Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Sidabowa Tahun 2022 Nomor 05);
39. Peraturan Desa Sidabowa Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana cadangan Pilkades Tahun 2027;
40. Peraturan Desa Sidabowa Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sidabowa Tahun 2022 Nomor 15);
50. Peraturan Kepala Sidabowa Nomor 04 Tahun 2023 tentang Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah Kepada Pemerintah Desa Sidabowa untuk peningkatan sarana prasarana perdesaan yang bersumberdana dari Anggaran Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDABOWA
dan
KEPALA DESA SIDABOWA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA SIDABOWA NOMOR 01 TAHUN 2024 TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDABOWA KECAMATAN PATIKRAJA KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan perincian sebagai berikut :

01. Pendapatan Desa		Rp. 2.504.335.847,-
a. Penghasilan Asli Desa (PAD)	Rp. 250.071.000,-	
b. Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 454.922.430,-	
c. Dana Desa (DD)	Rp. 1.251.676.000,-	
d. Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah	Rp. 135.339.998,-	
e. Banku Kabupaten	Rp. 200.000.000,-	
f. Banku Provinsi	Rp. 205.000.000,-	
g. Pendapatan Lain-lain (bunga Bank)	Rp. 7.326.419,-	
02. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 886.753.520,-	
b. Bidang Pembangunan	Rp. 647.912.890,-	
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 47.647.500,-	
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 665.685.250,-	
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Mendesak dan Darurat	Rp. 216.000.000,-	
Jumlah Belanja	Rp. 2.463.999.010,-	
Surplus/(Defisit)	Rp. 40.336.837,-	
03. Pembiayaan Desa		
a. Pencapaian Pembiayaan	Rp. 124.962.606,-	
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 8.000.000,-	
Pembiayaan Netto (a-b)	Rp. 116.962.606,-	
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	Rp. 157.299.443,-	

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini. terdiri dari:

- Laporan Keuangan;
- Laporan Realisasi Kegiatan Periode Januari-Desember Tahun Anggaran 2023.

Pasal 3

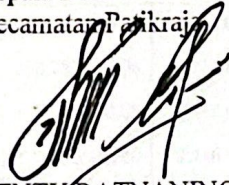
Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 7

Perturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sidabowa.

**Ditetapkan di : Sidabowa
Pada tanggal : 30 Januari 2024
Kepala Desa Sidabowa
Kecamatan Patikraja**



HENTY RATNANINGSIH

**Diundangkan di Desa Sidabowa
Pada tanggal 30 Januari 2024
Sekretaris Desa,**

SAMINGUN

**LEMBARAN DESA SIDABOWA KECAMATAN PATIKRAJA
BUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024 NOMOR 01**